

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara periodik, perusahaan menyajikan laporan keuangan bagi pihak-pihak kepentingan seperti investor dan kreditur yang berdampak pada pengambilan keputusan. Pada pelaporan, laba akan menjadi salah satu primadona atas kinerja manajemen dalam mengelola sumberdaya perusahaan. Akan tetapi kredibilitas laporan keuangan dapat berkurang dengan adanya manajemen laba, karena manajemen laba dapat menimbulkan bias dalam pelaporannya, hal ini dapat terjadi karena dorongan optimisme manajemen yang ingin menunjukkan prestasi perusahaan untuk mencapai keberlanjutan.

Praktik manajemen laba bisa kita lihat dalam kasus PT. Garuda Indonesia (GIAA) yang begitu menarik perhatian di tahun 2019 silam, dimana di dapati *net income* sebesar USD 809,85 ribu atau sekitar 11,33 milyar rupiah pada laporan keuangan tahun 2018, sedangkan pada laporan tahun 2017 GIAA ini mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan mendalam hingga dua komisaris, Chairil Tanjung dan Dony Oskaria selaku dan pemilik saham sebesar 28,08% tersebut menganggap bahwa dalam pelaporan keuangan tahun 2018 terdapat ketidaksesuaian PSAK. Dimana telah diamanemkannya perjanjian kerja sama yang diadakan terkait penyediaan layanan WIFI dalam penerbangan serta hiburan pada pesawat, terdapat ketidakjelasan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan baru, yaitu PT. Mahata Aero Teknologi. GIAA sendiri berani mengakui

100% pendapatan yang dihasilkan dari Mahata, sedangkan PT. Mahata pada tahun berjalan yaitu tahun 2018 baru menyelesaikan nilai kontrak 1 dari 203 pesawat. Hal ini yang kemudian dicurigai sebagai praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen GIAA, kecurigaan tersebut disampaikan melalui surat pada RUPST.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dan Kemenkeu sendiri memperlakukan transaksi ini sebagai pelanggaran pendapatan sewa. Sehingga PT. Garuda Indonesia (Persero) ditetapkan atas pelanggaran Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 pada pasal 69 mengenai Pasar Modal, Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan No. VIII.G.7 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi SAK 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 tentang Sewa.

Hal serupa terjadi pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berhasil mencetak laba bersih 11,56 triliun rupiah di sepanjang tahun 2018, laba tersebut naik hampir tiga kali lipat dari laba tahun 2017 yaitu sebesar 4,42 triliun rupiah. Pertumbuhan pendapatan yang dialami PLN sendiri pada tahun 2018 hanya sebesar 6,89% sedangkan di tahun 2017 pertumbuhan pendapatannya mencapai 14,57%. Akan tetapi pertumbuhan pendapatan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan beban usaha PLN pada tahun 2017 sebesar 275,47 triliun rupiah menjadi 308,18 triliun rupiah di tahun 2018.

Dan kembali terjadi pada PT. Pertamina (Persero) yang mempublikasikan *net income* pada tahun 2019 sebesar USD 2,54 miliar atau setara 35,99 triliun rupiah. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan piutang pemerintah yang belum

juga dibayarkan, dimana kompensasi selisih harga BBM tahun 2017 dan 2018 yang merupakan asal piutang pemerintah tersebut.

Pada saat laba perusahaan sedang menurun, dalam tujuan mempercantik laporan keuangan, salah satu upaya yang paling sering digunakan perusahaan adalah manajemen akan mengungkapkan laba bersih yang tinggi. Dikarenakan beban pelayanan publik yang diterima cukup tinggi, mengakibatkan posisi yang sulit bagi BUMN. Garuda dituntut untuk membuat banyak jalur penerbangan yang baru ke daerah-daerah tidak *feasible* secara bisnis. Sementara PLN dituntut untuk melaksanakan proyek pembangkit listrik dengan daya sebesar 35ribu Megawatt serta tuntutan pemerintah yang menetapkan PLN untuk mencapai target rasio elektifikasi, dan sama halnya pada Pertamina. Akan tetapi mereka sebagai perusahaan juga diharuskan memperoleh profit, karena dua tujuan tersebut tidak saling mendukung, sehingga tidak heran apabila kinerja BUMN menjadi tidak memuaskan.

Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi pada perusahaan BUMN saja, namun juga sering terjadi pada perusahaan swasta lainnya. Salah satu pemicu manajemen laba yang dapat terjadi secara berlebihan atau tidak wajar dan melanggar (*fraud*) adalah lemahnya *good corporate governance*. Dengan lemahnya gcg ini maka pengawasan terhadap manajemen pun turut lemah yang berdampak pada lolosnya praktik manajemen laba yang mungkin tidak disadari. Dari tiga perusahaan BUMN tersebut dapat dikatakan tata kelolanya buruk, sehingga pemerintah sering memberikan *previllage*, sayangnya hal tersebut tidak dimanfaatkan perusahaan BUMN tersebut untuk memaksimalkan kinerja perusahaannya. *Organization for*

Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan “*The internal means by which corporation are operated and controlled, which involve a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholder and other stakeholder.*” Dimana hal tersebut diartikan memiliki korelasi dan perbedaan peran yang berkaitan pada kewajiban *agency* dan *principal* dalam mewujudkan strategi emiten. Dengan *corporate governance* yang baik, perusahaan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi manajemen dalam melakukan implementasi manajemen laba adalah ukuran perusahaan, dengan asumsi bahwa perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar akan menutup manajemen dalam melakukan aktivitas manajemen laba karena perusahaan akan semakin diawasi oleh pihak eksternal dan masyarakat, maka perusahaan akan lebih hati hati dalam melaporkan kegiatannya. Namun untuk perusahaan yang ukuran perusahaannya kecil akan melakukan manajemen laba guna menarik perhatian pihak eksternal dan memberikan sinyal bahwa perusahaan ini mampu terus berkembang dan berkelanjutan.

Tingkat *leverage* juga dapat memicu terjadinya aktivitas manajemen laba, dimana semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka akan membuat semakin tinggi tuntutan bagi manajemen. Investor dan kreditur akan lebih memperhatikan dan cenderung berhati-hati dengan perusahaan karena dengan tingkat *leverage* yang tinggi identik dengan hutang jangka panjang yang tinggi,

secara potensial perusahaan dapat melanggar utang dengan berbagai kemungkinan seperti, tingkat bunga yang ditingkatkan, percepatan pada jatuh tempo, dan negosiasi ulang masa utang. Penggunaan utang yang tinggi akan menyebabkan tingginya tingkat beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan, motivasi ini akan memunculkan praktik manajemen laba agar perusahaan mampu mempublikasikan kinerjanya yang baik guna memberikan kepercayaan pada kreditur dalam menunjukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya.

Melalui penelitian sebelumnya, Bella Barzeera (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif pada manajemen laba, sedangkan Novi Lidiawati (2016) mengemukakan komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba. Tetapi hal ini bertentangan dengan Yuliana Saftiana dkk (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada manajemen laba. Proporsi dewan komisaris diuji oleh Clarissa Taco dan Ventje Ilat (2016) dengan hasil tidak berpengaruh pada manajemen laba, sedangkan penelitian tersebut berbanding terbalik dengan Setyarso Herlambang (2015) menyatakan proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif dan Joni Hendra dkk (2018) menyatakan proporsi dewan komisaris berpengaruh positif pada manajemen laba. Selanjutnya, pengujian kepemilikan institusional dilakukan oleh Ghazali dan Marsha (2017) dengan hasil tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Tetapi Arifin dan Desriana (2016) menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif, sedangkan Basuki Hadiprajitno dan Mega Marsela (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Sebagian besar penelitian mendukung asumsi *firm size* yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti Setyarso Herlambang (2015) serta Joni Hendra, Heri Koesharjono dan Seger Priantono (2018), yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, akan tetapi Yuliana Saftiana dkk (2017) menjelaskan tidak adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Dan terakhir, pada penelitian *leverage* yang diuji oleh Novi Lidiawati (2016) tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Saftiana dkk (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan Edi Yazar Soyadi (2020) mengatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Perusahaan manufaktur sub sector *consumer goods* adalah salah satu sector yang selalu menarik untuk masyarakat karena menyediakan barang yang memang dibutuhkan dalam kehidupan harian dan juga memiliki kemajuan yang cepat. Hal ini membuat persaingan bisnis menjadi kompetitif, oleh karena itu akan memicu pertumbuhan aktivitas manajemen laba. Penelitian ini adalah replica dan hasil dari pengembangan penelitian sebelumnya, atas dasar latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, peneliti tertarik dengan mengambil judul **“PENGARUH FAKTOR MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, maka permasalahan yang telah dirumuskan dan akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap manajemen laba?
5. Apakah *lverage* berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
4. Memberikan bukti empiris pengaruh *firm size* terhadap manajemen laba.
5. Memberikan bukti empiris pengaruh *lverage* terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai dampak mekanisme *Corporate Governance*, *Firm Size*, dan *Leverage* terhadap manajemen laba. Serta sebagai pelengkap salah satu prasyarat dalam menempuh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang di bidang ekonomi. Selain itu, diharapkan juga menjadi bukti empiris yang mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai *Corporate Governance*, *Firm Size*, *Leverage* dan manajemen laba.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bentuk kajian dalam mengevaluasi kualitas penerapan *Corporate Governance* dan lebih mendisiplinkan penerapan praktik *Corporate Governance* tersebut pada perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam menilai kemungkinan terjadinya manajemen laba, sehingga

manajemen dapat memaksimalkan kualitas kinerja mereka guna menggapai tujuan perusahaan.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dan saran untuk para investor dalam melakukan pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait dengan penanaman modal investasi yang akan dilakukan pada suatu perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada topik Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, *Firm Size*, dan *Leverage* terhadap Manajemen Laba Perusahaan dengan keterbatasan waktu dan jumlah data yang sangat luas maka diberikan pembatasan masalah dalam beberapa hal, yaitu;

1. Sample pada penelitian ini merupakan perusahaan *consumer goods* yang memenuhi syarat dan tercantum di BEI dengan rentang waktu 2015 sampai 2019.
2. Data perhitungan variabel yang dipakai berupa data dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan selama tahun 2015-2019 serta diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Pembahasan

Adapun berikut sistematika penulisan yang mencakup pembahasan singkat mengenai lima bab yang dibahas dalam penelitian ini;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab bagian awal ini membahas terkait latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dan review telaah literatur literatur yang relevan dan mendukung penelitian, serta dilanjutkan pada kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai populasi dan sampel yang diteliti serta teknik pengumpulan data, model empiris yang memuat variable penelitian, definisi operasional variable dan juga metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas terkait hasil penelitian yang didapat dari uji deskriptif statistik, asumsi klasik dan uji hipotesis serta pembahasan yang lebih luas atas hasil pengujian dari penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab terakhir ini menguraikan kesimpulan dan implikasi dari hasil penelitian, keterbatasan peneliti, serta saran yang disampaikan untuk penelitian selanjutnya.

